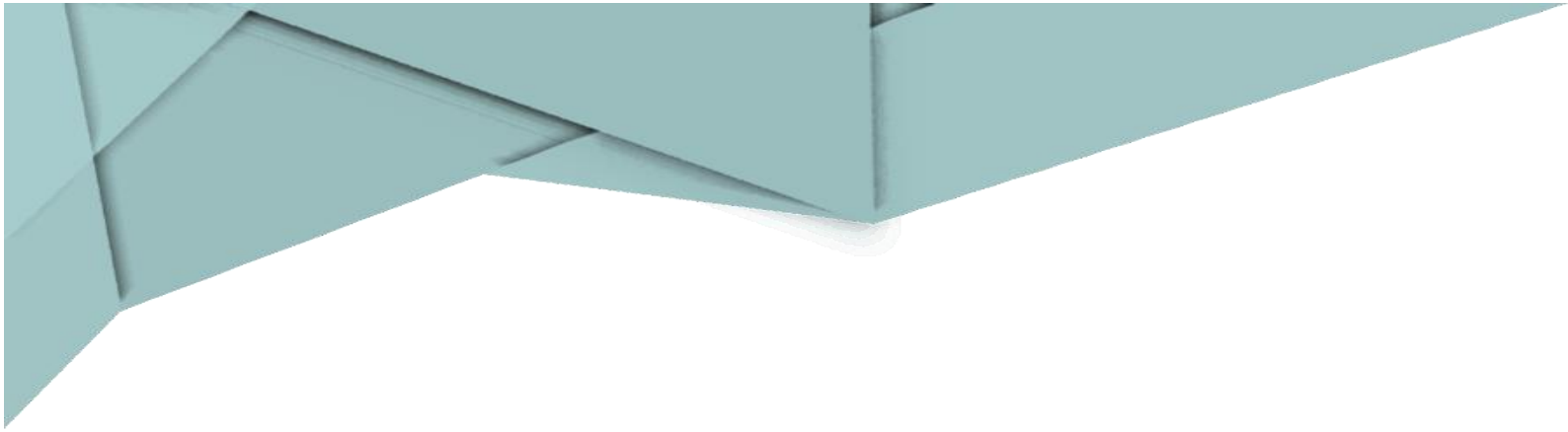




# **LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI TAHUN 2022**

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
SEKRETARIAT JENDERAL DPRRI  
JAKARTA, 2023



# EXECUTIVE SUMMARY

## Capaian Kinerja Deputy Bidang Administrasi Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Esensi	Esensi	100%	Sangat Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan	91	93,96	103%	Sangat Tinggi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,62	7,54*	99%	Sangat Tinggi
		Nilai Kinerja Organisasi	7,50	7,41*	99%	Sangat Tinggi
2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputy Bidang Administrasi	3,33	3,33	100%	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Administrasi	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputy Bidang Administrasi	A	AA	117%	Sangat Tinggi
		Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Administrasi	B	B	100%	Sangat Tinggi

Keterangan : \* Nilai Realisasi Tahun 2021

### 1. Risiko dan Hambatan

- Dalam melakukan survei kepuasan, Anggota DPR RI yang menjadi responden dapat berubah/berbeda dibanding tahun sebelumnya sehingga ada potensi hasil survei akan turun.
- Revisi anggaran yang tidak terkendali sehingga berpotensi menurunkan nilai IKPA karena dalam IKPA dibatasi jumlah pengajuan revisi.
- Tidak adanya monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala sehingga progress/perkembangan kinerja tidak terpantau.

## **2. Langkah-langkah Untuk Mengantisipasinya**

- Akan dilakukan pemilihan responden secara selektif untuk melihat perkembangan dan progress perbaikan yang dapat tercermin dalam hasil survei.
- Dilakukan revisi secara terjadwal sehingga unit kerja dapat mengajukan revisi anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat membatasi pengajuan revisi anggaran oleh unit kerja.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 6 bulan sekali untuk melihat perkembangan dan langkah penanganan apabila ada hambatan dalam pencapaian kinerja.



## PENGANTAR



**A**lhamdulillah, segala puji selalu kami panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga seluruh tahapan demi tahapan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Administrasi Tahun 2022 dapat dirampungkan dengan baik dan tepat waktu.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam SAKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Administrasi Tahun 2022 ini secara garis besar berisikan informasi tentang rencana kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI.

Terdapat 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Administrasi Tahun 2022, yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas, Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Administrasi dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Administrasi. Dalam sasaran-sasaran tersebut terdiri dari beberapa indikator kinerja yang masing-masing telah ditetapkan target dan

diperoleh capaian kinerja dengan kategori capaian “sangat tinggi”.

Keberhasilan penyusunan laporan kinerja ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Ketua Tim Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Administrasi Tahun 2022 beserta seluruh tim kerjanya.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya belum sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Laporan Kinerja Deputy Bidang Administrasi Tahun 2022 karena selalu ada kesempatan untuk melengkapi setiap kekurangan.

Semoga Laporan Kinerja Deputy Bidang Administrasi Tahun 2022 ini, mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja kita Bersama, sehingga mampu mewujudkan Deputy Bidang Administrasi yang professional dan modern dalam mendukung visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Jakarta, 16 Januari 2023  
Deputy Bidang Administrasi,



Sumariyandono

# DAFTAR ISI

<i>EXECUTIVE SUMMARY</i> .....	iii
PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GRAFIK .....	xii
TIM PENYUSUN .....	xiii
PENGHARGAAN TAHUN 2022 .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. GAMBARAN UMUM .....	1
1.2. DASAR HUKUM .....	2
1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	3
1.4. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ....	5
1.4.1. Sumber Daya Manusia .....	5
1.4.2. Restrukturisasi Organisasi .....	7
1.4.3. Pemblokiran Anggaran .....	8
1.4.4. Penataan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	8
1.4.5. Pengembangan Aplikasi .....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
2.1. RENCANA SRATEGIS .....	11
2.2. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI TAHUN 2022 .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	23
3.2. REALISASI ANGGARAN .....	49
BAB IV PENUTUP .....	55
4.1. KESIMPULAN .....	55
4.2. LANGKAH PERBAIKAN .....	57
LAMPIRAN .....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Deputy Bidang Administrasi .....	5
Gambar 2.1	Visi, Misi, dan Tujuan Deputy Bidang Administrasi .....	12
Gambar 2.2	<i>Cascading</i> Kinerja Sekjen dan Deputy Bidang Administrasi	15
Gambar 2.3	Tingkat Kematangan UKPBJ .....	18
Gambar 2.4	Rentang Nilai Mutu Pelayanan .....	20
Gambar 2.5	Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	21
Gambar 2.6	Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .....	22
Gambar 3.1	Pemenuhan Standar LPSE .....	27
Gambar 3.2	Sertifikat Standar Pengelolaan Aset .....	28
Gambar 3.3	Sertifikat Pengelolaan Resiko .....	28
Gambar 3.4	Upaya Perbaikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PPNASN Per Unit Kerja Tahun 2022 .....	9
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan IKU Setjen DPR RI .....	13
Tabel 2.2	Sasaran Program dan IKU Deputi Bidang Administrasi .....	14
Tabel 2.3	Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang Administrasi .	15
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022 .....	16
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Administrasi Tahun 2022 .....	17
Tabel 2.6	Unsur Penilaian IKPA .....	18
Tabel 2.7	Kategori Penilaian IKPA .....	19
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Deputi Bidang Administrasi Tahun 2022 .....	24
Tabel 3.2	Persandingan Kinerja Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2022 .....	26
Tabel 3.3	Persandingan Kinerja Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2024 .....	26
Tabel 3.4	Rincian Penilaian IKPA Tahun 2022 .....	29
Tabel 3.5	Persandingan Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Tahun 2021 dan 2022 .....	30
Tabel 3.6	Persandingan Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Tahun 2022 dan Standar Nasional .....	30
Tabel 3.7	Persandingan Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Tahun 2022 dan 2024 .....	30
Tabel 3.8	Persandingan Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2021 dan 2024 .....	32
Tabel 3.9	Komponen Pembentuk Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	32
Tabel 3.10	Persandingan Kinerja Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2021 dan 2024 .....	34
Tabel 3.11	Jumlah Data Responden Per Fraksi .....	38

Tabel 3.12	Persandingan Hasil Survei Tahun 2021 dan 2022 .....	40
Tabel 3.13	Rekapitulasi Hasil Survei Per Eselon .....	41
Tabel 3.14	Persandingan Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Tahun 2022 dan 2024 .....	42
Tabel 3.15	Reklasifikasi Kategori Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	44
Tabel 3.16	Persandingan Kinerja Nilai RB Tahun 2021 dan 2022 .....	45
Tabel 3.17	Persandingan Kinerja Nilai RB Tahun 2022 dan Standar Nasional .....	45
Tabel 3.18	Persandingan Kinerja Nilai Tahun 2022 dan 2024 .....	45
Tabel 3.19	Persandingan Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2021 dan 2022 .....	47
Tabel 3.20	Persandingan Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2021 dan 2022 .....	47
Tabel 3.21	Persandingan Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Tahun 2022 dan Standar Nasional .....	48
Tabel 3.22	Persandingan Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2022 dan 2024 .....	48
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2022 .....	50
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Per Sasaran Program .....	54

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi PNS di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Tahun 2022 Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	6
Grafik 1.2	Komposisi PNS di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Tahun 2022 Berdasarkan Kelompok Usia.....	6

# TIM PENYUSUN

## **Pengarah**

Ir. Sumariyandono, MPM.

## **Ketua**

Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si.

## **Wakil Ketua**

Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak.

## **Sekretaris**

Andi Mahirah, S.Kom., M.M.

## **Anggota**

Reny Amir, S.H., M.M., MLI

Edy Susilo, S.H.

Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si

Murni Elok Pertiwi, S.E., M.A.B

Afniwaty Tanjung, S.E., M.E.

Dwita Amelia Fitriani, S.E.

Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim, S.Kom.M.Ak

Ni'mah Wahyu Purnami, S.E.

Dwi Widayanti, S.IP.

Vega Lavlinesia, S.E., M.Ak.

Sri Murti Nardani, S.E.

Tomy Susanto, S.H.

Sutrisno, S.E.

Bambang Soleh Zulfikar, SKM.

Anna Dania, A.Md

Eri Priyono

Wilda Alya Gunawan

# PENGHARGAAN TAHUN 2022



**01**

Penerima Penghargaan raihan IKPA Terbaik I Satker Dewan Triwulan II Tahun Anggaran 2022

**02**

Penerima Penghargaan raihan IKPA Terbaik II Satker Dewan Triwulan III Tahun Anggaran 2022

**03**

Penerima penghargaan Anggota JDIH Nasional Terbaik Kedua Tahun 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM



**04**

Penghargaan atas Realisasi SV Terbesar Satker Setjen Kelolaan KPPN Jakarta VII



**05**

Juara Ketiga Anugrah Reksa Banda oleh Kementerian Keuangan



**06**

Penghargaan dalam penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan predikat "Sangat Baik" dari KASN



**07**

Penghargaan penerapan Sistem Merit dalam Pengisian JPT Tahun 2021 dengan kualitas "Baik"



**08**

Peringkat 3 BKN Award atas capaian dalam Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi pegawai



**09**

Best Starter Survei Indeks Ber AKHLAK oleh KemenPANRB



**10**

Penghargaan WTP Opini BPK atas Laporan Keuangan



**11**

Penghargaan Kontribusi Pemenuhan Kewajiban Pajak Tahun 2021







# BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 GAMBARAN UMUM
- 1.2 DASAR HUKUM
- 1.3 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
- 1.4 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

## 4.1. GAMBARAN UMUM

Tahun 2022 merupakan tahun akselerasi. Kondisi pandemi covid-19 sudah mulai berangsur membaik. Berbagai pelonggaran mulai dibuka sehingga Kementerian/Lembaga (K/L) dapat melaksanakan kegiatannya secara normal. Puncaknya, Presiden RI, Joko Widodo, resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tanggal 30 Desember 2022. Pencabutan status tersebut juga berimbas pada sejumlah ketentuan di ruang publik.

Akselerasi tersebut dapat tercermin dari sejumlah kebijakan penganggaran. Apabila tahun 2020 dan 2021 terjadi penghematan anggaran atau *refocusing* oleh Kementerian Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19, maka di tahun 2022, kebijakan tersebut ditiadakan karena kondisi pandemi berangsur membaik. Selanjutnya, untuk kebijakan terkait perjalanan dinas, apabila sebelumnya dibatasi, mulai dilonggarkan sehingga K/L dapat mengoptimalkan kegiatannya.

Di tahun 2022, Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) memiliki nakhoda baru yang definitif yaitu Bapak Ir. Sumariyandono, MPM, setelah hampir 3 (tiga) tahun dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) sejak tahun 2019. Terpilihnya pejabat definitif tersebut akan mengakselerasi kinerja Deputy Bidang Administrasi. Deputy dapat fokus menjalankan tugas dan fungsinya serta mengawal program kerja yang telah disusun.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan bentuk akuntabilitas atas program kerja yang telah disusun. Hasil dari LKj tersebut akan dievaluasi dan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja dan target ke depan.

#### **4.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3).
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- d. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 24 Tahun 2021.
- f. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### 4.3. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dibentuk Setjen DPR RI. Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Setjen DPR RI menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi, pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
- h. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Deputi Bidang Persidangan;
- b. Deputi Bidang Administrasi;
- c. Badan Keahlian; dan
- d. Inspektorat Utama.

Deputi Bidang Administrasi terdiri atas 6 (enam) Biro, yaitu:

a. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) bagian atau unit kerja yaitu Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, dan Bagian Pengaduan Masyarakat.

b. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas pengelolaan manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas 4 (empat) bagian atau unit kerja yaitu Bagian Perencanaan dan Pola Karir Aparatur Sipil Negara, Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara, Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara, dan Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional.

c. Biro Organisasi dan Perencanaan

Biro Organisasi dan Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan penataan organisasi dan jabatan, penataan tata laksana, perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Biro Organisasi dan Perencanaan terdiri atas 3 (tiga) bagian atau unit kerja yaitu Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Perencanaan, dan Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

d. Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pengadministrasian barang milik negara, dan administrasi perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal. Biro Keuangan terdiri atas 3 (tiga) bagian atau unit kerja yaitu Bagian Administrasi Keuangan, Bagian Administrasi Barang Milik Negara, dan Bagian Perjalanan.

e. Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma

Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan gedung dan instalasi, pengelolaan rumah

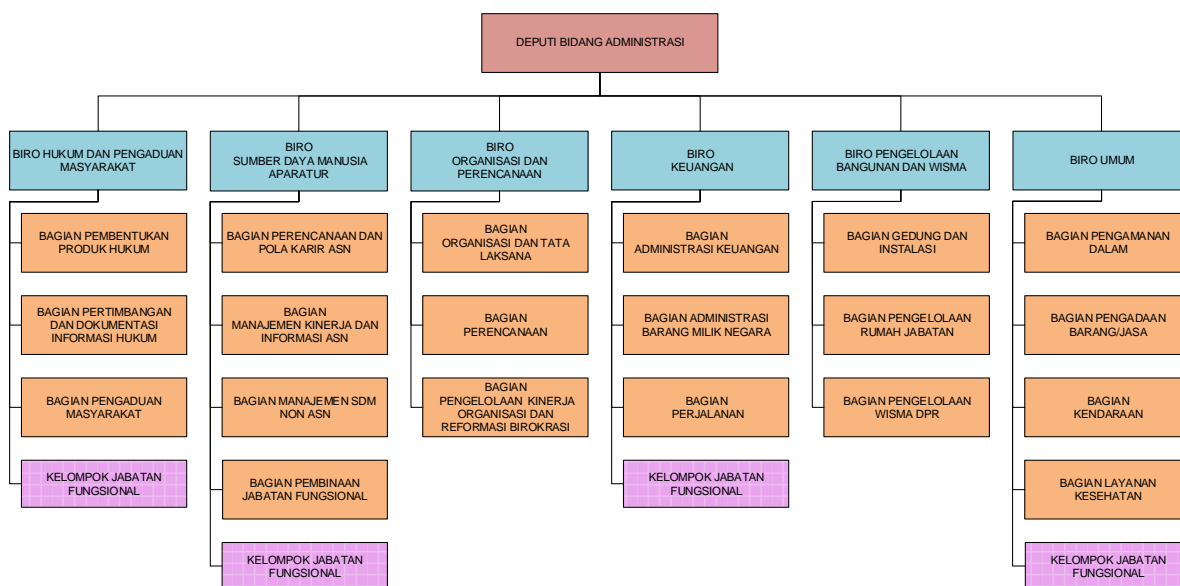
jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta pengelolaan wisma Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma terdiri atas 3 (tiga) bagian atau unit kerja yaitu Bagian Gedung dan Instalasi, Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan, dan Bagian Pengelolaan Wisma DPR.

f. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pengamanan, layanan pengadaan barang/jasa, pelayanan kendaraan dinas, dan pelayanan kesehatan. Biro Umum terdiri atas 4 (empat) bagian atau unit yaitu Bagian Pengamanan Dalam, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Kendaraan, dan Bagian Layanan Kesehatan.

**Gambar 1.1**

**Struktur Organisasi Deputi Bidang Administrasi**



Sumber: Bagian Ortala, 2022

**4.4. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

**1.4.1. Sumber Daya Manusia**

Ada dua aspek penting dalam pengelolaan SDM, yaitu kapabilitas (kemampuan) dan kapasitas (jumlah SDM yang tersedia). Kapabilitas dapat dipengaruhi dari jenjang pendidikan dan usia. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, afektif, dan



psikometrik. Sedangkan kapasitas dapat dilihat dari jumlah pegawai yang tersedia apakah mencukupi atau tidak. Usia berpengaruh terhadap penerimaan atas perubahan dan perkembangan teknologi. Semakin besar jumlah usia muda maka akan semakin baik untuk instansi karena mereka merupakan modal jangka panjang yang dapat terus dikembangkan dan adaptif terhadap perubahan.



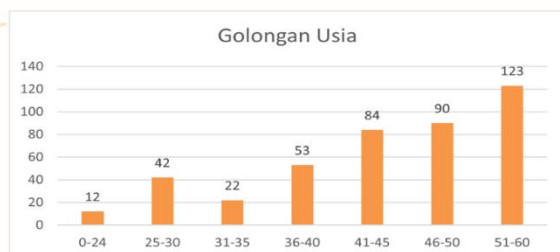
**Grafik 1.1**

Komposisi PNS di Lingkungan Deputy Bidang Administrasi Tahun 2022 Berdasarkan Pendidikan Terakhir



**Grafik 1.2**

Komposisi PNS di Lingkungan Deputy Bidang Administrasi Tahun 2022 Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber: Bagian MKIASN, 2022

Dari jenjang Pendidikan, jumlah PNS dengan tingkat pendidikan minimal Sarjana mencapai 193 orang atau 46% dari total PNS di lingkungan Deputy Bidang Administrasi yang mencapai 426 orang. Untuk Pendidikan Diploma I – IV sebesar 33 orang atau 8%. Adapun untuk tingkat Pendidikan SD – SMA/SMK mencapai 200 orang atau 46%. Apabila dibandingkan rata-rata nasional, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara per 30 Juni 2022, jumlah tersebut masih di bawah rata-rata. Jumlah rata-rata nasional PNS yang memiliki pendidikan minimal Sarjana sebesar 70%, Diploma I – IV sebesar 15%, dan SD – SMA/SMK sebesar 15%. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan karena berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, afektif, dan psikometrik.

Dari sudut pandang usia, jumlah pegawai yang berusia 40 tahun ke bawah mencapai 129 orang atau 31% dari total pegawai sebesar 426 orang. Jumlah tersebut di bawah rata-rata nasional yang mencapai 34,03%. Ke depan, porsi tersebut akan terus ditingkatkan melalui rekrutmen yang bekerja sama dengan sekolah kedinasan dan melalui mekanisme mutasi pegawai.



#### 1.4.2. Restrukturisasi Organisasi

Sebagai sistem pendukung DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI senantiasa melakukan evaluasi dan penataan organisasi untuk menjawab dinamika organisasi dan perkembangan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Penataan organisasi juga dilaksanakan untuk menyelaraskan dengan dinamika organisasi baik dari dalam maupun dari luar Sekretariat Jenderal DPR RI. Terkait dengan dinamika yang berasal dari dalam Sekretariat Jenderal DPR RI, dilaksanakan berdasarkan usulan dari unit kerja dan analisis dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana dengan melihat perkembangan yang terjadi. Penataan Organisasi dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada tahun 2022, unit kerja di Deputi Bidang Administrasi mengajukan usulan penataan organisasi antara lain di Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Biro Organisasi dan Perencanaan, Biro Keuangan, dan Biro Umum. Penataan yang dilaksanakan meliputi penataan tugas dan fungsi serta perubahan nomenklatur.

Restrukturisasi organisasi tersebut akan mempengaruhi mekanisme kerja/SOP yang saat ini telah dimiliki. Deputi Bidang Administrasi pada hakekatnya sudah memiliki SOP sejak tahun 2016, namun seiring dengan berjalannya waktu mekanisme kerja tersebut dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi *existing* organisasi saat ini. Dengan adanya penataan organisasi, perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme kerja, kemajuan teknologi informasi dan permintaan pelayanan yang lebih cepat dan akurat, maka sejatinya mekanisme kerja yang sudah dimiliki sebelumnya dapat dievaluasi dan diidentifikasi ulang yang nantinya akan menjadi panduan bagi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2022, dalam melaksanakan penataan mekanisme kerja di lingkungan Deputi Bidang Administrasi difokuskan kepada memperbarui mekanisme kerja yang sudah ada dan menurunkan mekanisme kerja menjadi prosedur kerja yang lebih rinci. Mekanisme kerja tersebut berkaitan dengan pelaksanaan revisi anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, pelaksanaan RB, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan rumah jabatan anggota, pengelolaan BMN, pengelolaan bangunan dan gedung di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

### **1.4.3. Pemblokiran Anggaran**

Pelaksanaan anggaran tahun 2022 diawali dengan terbitnya surat Menteri Keuangan Nomor 1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2022. Setiap Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan pencadangan anggaran (blokir) sebesar 5% dari total pagu. Anggaran DPR RI yang diblokir sebesar Rp285.723.566.000,- terdiri dari Satker Dewan sebesar Rp210.640.199.000,- dan Satker Setjen sebesar Rp75.083.357.000,-.

Pada anggaran Satker Setjen, anggaran yang diblokir terdapat pada anggaran Deputi Bidang Administrasi sebesar Rp40.054.646.000,-. Blokir anggaran *Automatic Adjustment* menyebabkan beberapa kegiatan di jajaran Deputi Bidang Administrasi menjadi tidak dapat dilaksanakan.

Sekretariat Jenderal DPR RI mengirimkan kembali surat kepada Menteri keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan nomor B/13425/KU.01/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan hal rencana pembukaan *Automatic Adjustment* Tahap I. Surat tersebut telah ditanggapi oleh Kementerian Keuangan melalui surat nomor: S-297/AG/AG.4/2022 tanggal 2 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa usulan pembukaan blokir tersebut dapat disetujui, namun tidak disetujui seluruhnya, anggaran blokir sebesar Rp11.489.299.000,- dari Belanja Pegawai Satker Setjen, tidak dapat disetujui pembukaan blokirnya dan anggaran tersebut dikembalikan ke Negara (Kementerian Keuangan).

### **1.4.4. Penataan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)**

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) perlu ada sinkronisasi pengaturan mengenai pegawai pemerintah non Aparatur Sipil Negara (PPNASN) di Setjen DPR RI. Pengaturan tentang PPNASN sebelumnya diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menimbang hal tersebut, pada tahun 2022 Sekretaris Jenderal DPR RI telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal

DPR RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tenaga Sistem Pendukung Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jumlah tenaga PPNASN di lingkungan Deputi Bidang Administrasi sebesar 1.022 orang, termasuk tenaga pengemudi dan pengamanan dalam. Mengelola SDM yang sangat besar tersebut membutuhkan manajemen SDM yang optimal sehingga dapat senantiasa mendukung kinerja Deputi Bidang Administrasi. Namun, bila tidak dikelola dengan baik, maka dapat menjadi bom waktu yang akan menghambat organisasi.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PPNASN Per Unit Kerja Tahun 2022**

<b>NAMA UNIT KERJA</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI</b>
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	7
Biro SDM Aparatur	14
Biro Organisasi dan Perencanaan	7
Biro Keuangan	23
Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	200
Biro Umum	770
<b>Total</b>	<b>1.021</b>

Sumber: Bagian Manajemen SDM Non ASN, 2022

#### **1.4.5. Pengembangan Aplikasi**

Beberapa unit kerja di lingkup Deputi Bidang Administrasi yang bersinggungan langsung terhadap pemberian layanan ke Anggota DPR RI adalah Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dan Biro Keuangan. Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma memiliki salah satu aplikasi/kanal pengaduan berupa aplikasi Pelayan Rumah Jabatan Anggota Kalibata (PERJAKA). Aplikasi tersebut sebagai sarana pengaduan/keluhan bagi penghuni RJA Kalibata. Ke depan, aplikasi tersebut akan dikembangkan sehingga penghuni RJA Ulujami pun dapat menggunakannya.

Adapun untuk Biro Keuangan terdapat beberapa aplikasi antara lain aplikasi SIRANGGA, aplikasi SILOPER, aplikasi Aladin, aplikasi Abidin, aplikasi SIHARKA, dan proses pembangunan DigitAll untuk 3 aplikasi besar di bagian

Administrasi Keuangan. Untuk teknologi informasi digital melalui web Biro Keuangan dan web Bagian perjalanan (<http://perjadin.dpr.go.id>) serta media sosial lain yang dimiliki unit kerja sehingga dapat menyampaikan informasi kapan saja & dimana saja, dengan perangkat apa saja, mudah, cepat dan akurat.

Selain itu, Bagian Perjalanan melakukan peningkatan layanan sesuai dengan Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dengan memenuhi komponen standar pelayanan, diantaranya dengan membuat standar layanan, melakukan survey kepuasan pelayanan kepada pengguna layanan, dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Dalam memberikan layanannya kepada semua pengguna layanan, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan (ibu hamil, anak-anak dan kelompok difabel), dengan memberikan prioritas layanan kepada mereka dan menyediakan sarana prasarana berupa kursi prioritas, pojok bermain anak dan toilet ramah difabel di lantai 1 Gd. Setjen DPR RI.



## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

### **2.2 PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI TAHUN 2022**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas Deputi Bidang Administrasi, Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Administrasi memuat visi jangka menengah sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan.

Segala program dan kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Administrasi harus mendukung program dan kegiatan kesetjengan sehingga indikator dan target kinerja yang disusun harus mengacu (cascade) dari indikator dan target kinerja Setjen DPR RI.



Dalam Gambar 3.1 diuraikan rumusan visi, misi, dan tujuan Deputy Bidang Administrasi sebagaimana terdapat dalam Renstra Deputy Bidang Administrasi tahun 2020-2024.



**Gambar 2.1**  
**Visi, Misi, dan Tujuan Deputy Bidang Administrasi**

Secara mendasar, visi Setjen DPR RI menjadi visi bagi Deputy Bidang Administrasi. Visi Deputy Bidang Administrasi merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan di tahun 2024. Apa yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Administrasi dalam lima tahun ke depan harus selaras dengan visi Setjen DPR RI.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Deputy Bidang Administrasi untuk menjadikan unit kerja Deputy Bidang Administrasi berkinerja tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi Setjen DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Profesional mencerminkan sumber daya manusia yang berada di bawah Deputy Bidang Administrasi memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Modern menggambarkan bahwa Deputy Bidang Administrasi mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.



Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI serta tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Administrasi. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Deputi Bidang Administrasi menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan.

Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata dari suatu Program. Apa yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Administrasi harus selaras dengan sasaran yang akan dituju oleh Setjen DPR RI. Sekjen DPR RI memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana yang tercantum di tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis dan IKU Setjen DPR RI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
<b>Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI</b>	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,22	3,24	3,26	3,28
<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas</b>	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	A	A	AA
	2. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	A	A	A
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
	4. Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	5. Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	6	8	10
	7. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"	1	1	2	1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
	8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	BB	A	A	A
Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Untuk mendukung sasaran strategis Setjen DPR RI tersebut, maka sasaran program yang akan disusun oleh Deputi Bidang Administrasi harus selaras. Semua program dan kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Administrasi juga masuk ke dalam Program Dukungan Manajemen. Adapun sasaran program beserta indikator kinerja dari Deputi Bidang Administrasi tercantum di tabel 2.2.

Indikator dan target kinerja tahunan (Perjanjian Kinerja) dapat dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi atau kinerja terbaru.

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Program dan IKU Deputi Bidang Administrasi**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Inisiasi	Inisiasi	Esensi	Proaktif
	2. Indeks Pengelolaan Keuangan	91	92	93	94
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,52	7,65	7,72	7,82
	4. Nilai Kinerja Organisasi	4,63	4,73	4,83	4,93
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,22	3,24	3,26	3,28

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi	BB	A	A	AA
	2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi	B	B	A	A

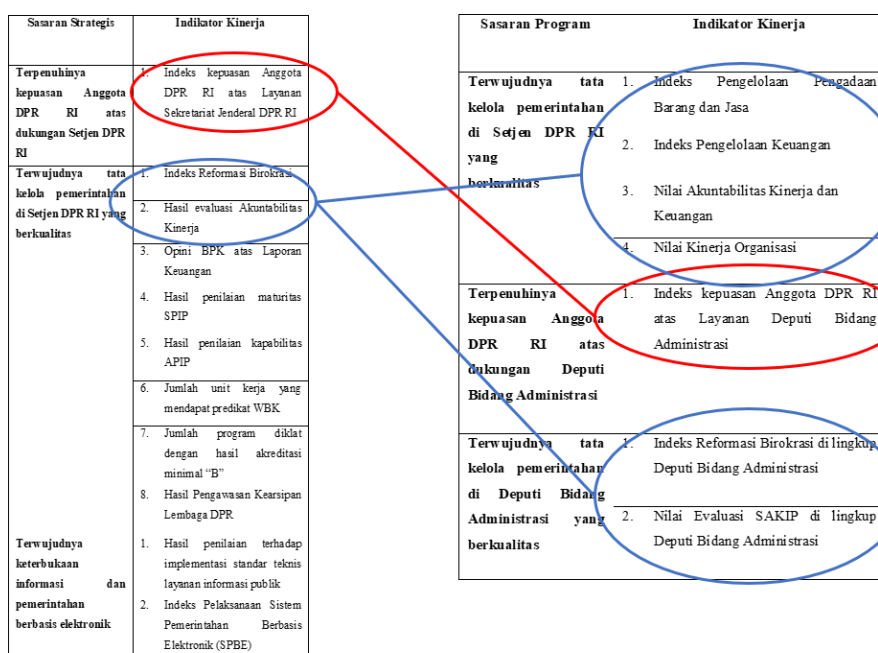
Tabel 2.3

Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang Administrasi

Tujuan	Sasaran Program
Terwujudnya dukungan administrasi yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi
Terwujudnya tata kelola administrasi yang profesional dan baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas

Gambar 2.2

Cascading Kinerja Sekjen dan Deputi Bidang Administrasi



## 2.2. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI TAHUN 2022

Di dalam Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI, terdapat 3 (tiga) sasaran yang memuat 11 (sebelas) indikator kinerja utama. Indikator kinerja tersebut selaras dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Persekjen Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Persekjen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024.

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,24
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A
	2. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
	4. Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3
	5. Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3
	6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6
	7. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"	4
	8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A
Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif
	2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik

Pencantuman Perjanjian Kinerja (PK) Setjen DPR RI Tahun 2022 dalam laporan ini sangat dibutuhkan untuk melihat keselarasan antara PK Sekjen DPR RI dan PK Deputi Bidang Administrasi. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Administrasi

terdiri atas 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama. Indikator kinerja Deputy Bidang Administrasi harus selaras dengan indikator kinerja Sekjen DPR RI.

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Administrasi Tahun 2022**

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas</b>	1.	Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Esensi
	2.	Indeks Pengelolaan Keuangan	91
	3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,62
	4.	Nilai Kinerja Organisasi	7,50
<b>Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Administrasi</b>	1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputy Bidang Administrasi	3,33
<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Administrasi yang berkualitas</b>	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputy Bidang Administrasi	A
	2.	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Administrasi	B

Metode penghitungan capaian atas indikator kinerja di Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Administrasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**1. Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Hasil penghitungan kinerja “Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa” berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

**Gambar 2.3**  
Tingkat Kematangan UKPBJ



## 2. Indeks Pengelolaan Keuangan

Penilaian Kinerja “Indeks Pengelolaan Keuangan” menggunakan Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA. Ada 8 (delapan) indikator yang digunakan sebagai unsur penilaian, sebagaimana yang tercantum di tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Unsur Penilaian IKPA**

No.	Unsur	Bobot
1.	Revisi DIPA	10
2.	Deviasi Halaman III DIPA	10
3.	Penyerapan Anggaran	20
4.	Belanja Kontraktual	10
5.	Penyelesaian Tagihan	10
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10
7.	Dispensasi SPM	5



No.	Unsur	Bobot
8.	Capaian Output	25
<i>Total</i>		<i>100</i>

Hasil penilaian IKPA tersebut terbagi ke dalam 4 kategori sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Kategori Penilaian IKPA**

Nilai	Kategori
≥ 95	Sangat Baik
89 - 94	Baik
70 - 88	Cukup
< 70	Kurang

### 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Hasil penghitungan menggunakan hasil penilaian Kementerian PAN & RB. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan terdiri atas Nilai SAKIP dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya. Skala nilai 1 - 10.

### 4. Nilai Kinerja Organisasi

Hasil penghitungan menggunakan hasil penilaian Kementerian PAN & RB. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Nilai

Kinerja Organisasi terdiri atas Capaian Kinerja, Capaian Kinerja Lainnya, dan Survei Internal Organisasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya. Skala nilai 1 - 10.

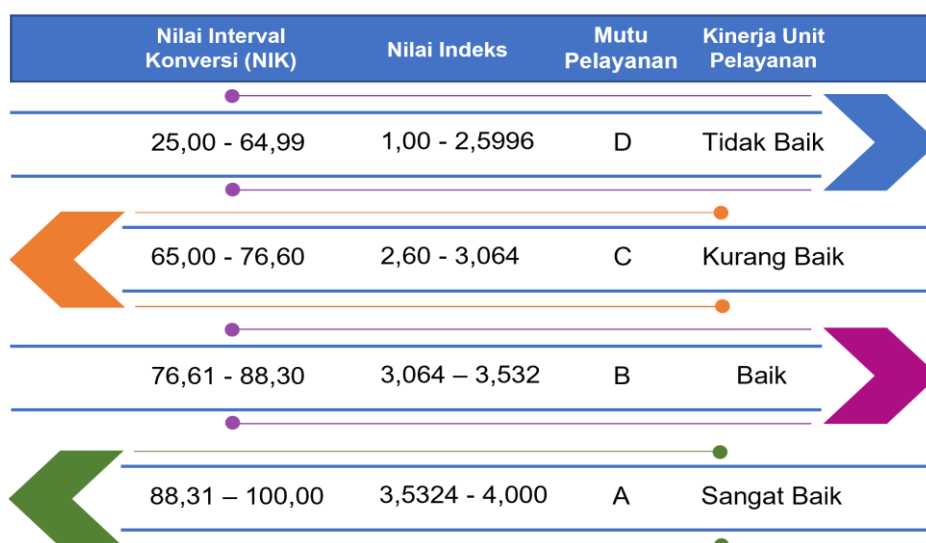
#### 5. Indeks Kepuasan Anggota DPR atas Layanan Deputi Bidang Administrasi

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

**Gambar 2.4**

Rentang Nilai Mutu Pelayanan



## 6. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi

Hasil penghitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, atau sama dengan penilaian indeks RB Setjen DPR RI.

**Gambar 2.5**

Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



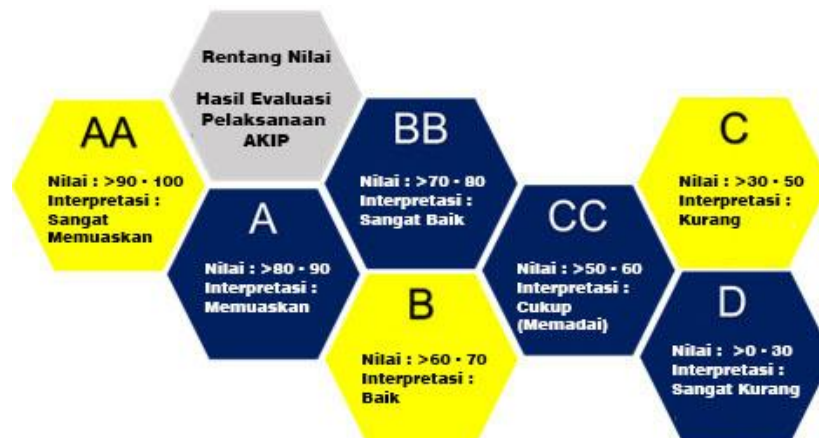
## 7. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi

Hasil penghitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, atau sama dengan penilaian

evaluasi SAKIP Setjen DPR RI.

**Gambar 2.6**

Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja





## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

### **3.2 REALISASI ANGGARAN**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Analisis capaian kinerja organisasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan agar lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran program/kegiatan, indikator kinerja dengan target hasil capaian selama satu tahun.

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Administrasi Tahun 2022 mempunyai 3 (tiga) sasaran program dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Adapun rincian capaian kinerja Deputy Bidang Administrasi dari masing-masing sasaran strategis terdapat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

## Capaian Kinerja Deputi Bidang Administrasi Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Esensi	Esensi	100%	Sangat Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan	91	93,96	103%	Sangat Tinggi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,62	7,54*	99%	Sangat Tinggi
		Nilai Kinerja Organisasi	7,50	7,41*	99%	Sangat Tinggi
2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Administrasi	3,33	3,33	100%	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi	A	AA	117%	Sangat Tinggi
		Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi	B	B	100%	Sangat Tinggi

\*Data realisasi merupakan data capaian tahun 2021



# Sasaran 1

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas

01

Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa



02

Indeks Pengelolaan Keuangan



03

Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan



04

Nilai Kinerja Organisasi



## 1. Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Penilaian atas Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa dilakukan oleh LKPP. Capaian di tahun 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu mencapai tahapan “Esensi”, sesuai dengan target yang telah ditetapkan (tabel 3.1). Apabila dibandingkan dengan kinerja di tahun 2021, capaian di 2022 mengalami peningkatan (tabel 3.2). Tahun 2021, indeks pengelolaan pengadaan barang dan jasa masih di tahap paling bawah yaitu Inisiasi. Kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Esensi.

**Tabel 3.2**  
**Persandingan Kinerja Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**  
**Tahun 2021 dan 2022**

Indikator Kinerja: Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inisiasi	Inisiasi	100	Esensi	Esensi	100

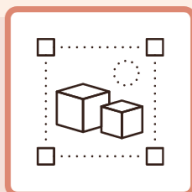
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana yang tercantum di Renstra yaitu “Proaktif”, maka capaian di tahun 2022 telah mencapai 2/3 atau 67% dari target tersebut (tabel 3.3).

**Tabel 3.3**  
**Persandingan Kinerja Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan**  
**Jasa Tahun 2021 dan 2024**

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Esensi	Proaktif	67%

Adapun upaya-upaya yang ditempuh menuju target “Proaktif” antara lain pemenuhan 17 standar LPSE, penyelesaian SOP yang dibutuhkan untuk penilaian maturitas UKPBJ, dan perolehan sertifikat pengelolaan aset dan pengelolaan resiko sebagaimana yang tercermin di gambar 3.1, gambar 3.2, dan gambar 3.3.

## BUKTI DUKUNG



### DOMAIN MANAJEMEN PENGADAAN DAN SISTEM INFORMASI

#### SOP

- 1.SOP Penanganan Permasalahan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
2. SOP Analisa Ketersediaan Pelaku Usaha
3. SOP Pelaksanaan Kontrak
4. SOP Pengelolaan Risiko Pengadaan Barang/Jasa
5. SOP Registrasi dan Verifikasi Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa
6. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
7. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa
8. SOP Pemilihan Pascakualifikasi
9. SOP Pemilihan Prakualifikasi
- 10.SOP Persiapan Pengadaan

#### Standar Layanan

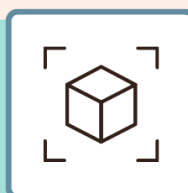
- 1.Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk
- 2.Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat
- 3.Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan
4. Standar 11: Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan
5. Standar 17: Penilaian Internak
6. Berita Acara Notulensi rapat dengan Pelaku Pengadaan dan/atau Pelaku Usaha

### DOMAIN MANAJEMEN KINERJA



- 1.SOP Pengelolaan Perencanaan Pengadaan
- 2.SOP Pengelolaan Kinerja PBJ
- 3.Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Bagian PBJ
4. Dokumen Standar 15 LPSE: Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan

## BUKTI DUKUNG



### DOMAIN KELEMBAGAAN

1. Dokumen regulasi berisi tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Persekjen Nomor 24 Tahun 2021
2. Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui *Stakeholder* dengan pihak internal (PPK, POKJA, APIP) serta eksternal (Penyedia, APH)
3. Laporan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan pihak terkait dalam pelaksanaan paket

### DOMAIN MANAJEMEN PENYEDIA



- 1.SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
- 2.SOP Registrasi dan Verifikasi Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

**Gambar 3.1**  
**Pemenuhan Standar LPSE**





**Gambar 3.2**  
**Sertifikat Standar Pengelolaan Aset**



**Gambar 3.3**  
**Sertifikat Standar Pengelolaan Risiko**

## 2. Indeks Pengelolaan Keuangan

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L. IKPA pada tahun anggaran 2020 dan 2021 memiliki 13 indikator yang berfokus pada 4 aspek yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan efektivitas pelaksanaan anggaran, namun pada tahun anggaran 2021 terdapat perubahan bobot penilaian atas indikator data kontrak, penyelesaian tagihan dan capaian output.

Penilaian atas Indeks Pengelolaan Keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nilai indeks pengelolaan keuangan tahun 2022 mencapai 93, 2021 mencapai 88,10. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka target tersebut tidak tercapai. Kemudian, dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 94,03 maka terdapat penurunan.

IKPA pada tahun anggaran 2020 dan 2021 memiliki 13 indikator yang berfokus pada 4 aspek yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan efektivitas pelaksanaan anggaran, namun pada tahun anggaran 2021 terdapat perubahan bobot penilaian atas indikator data kontrak, penyelesaian tagihan dan capaian output.

Tahun anggaran 2022 terdapat evaluasi capaian IKPA dan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian

output, sehingga IKPA pada tahun anggaran 2022 memiliki 8 indikator yang berfokus pada 3 aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Reformulasi IKPA mempengaruhi perubahan tata cara penilaian yang dapat mengakibatkan perubahan nilai IKPA.

Berdasarkan nilai IKPA yang diperoleh dari aplikasi Monev Kementerian, nilai IKPA DPR RI mencapai 93,96 dengan predikat “Baik”. Adapun rincian penilaiannya tercantum di tabel 3.4. Capaian kinerja tersebut di atas target yang telah ditetapkan (tabel 3.1). Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka capaian di tahun 2022 lebih tinggi dengan kenaikan sebesar 5,86 poin (tabel 3.5).

Nilai IKPA tersebut juga lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang mencapai 93,14 (tabel 3.6). Data yang didapatkan, DPR RI mendapat peringkat 17 dari 80 Kementerian atau Lembaga di seluruh Indonesia dengan predikat nilai “Baik”. Kedepannya nilai IKPA DPR RI harus terus ditingkatkan terutama untuk beberapa indikator seperti Deviasi Halaman III DIPA dan belanja kontraktual agar bisa mendapatkan predikat nilai yang lebih baik lagi.

Di samping membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, perlu kiranya membandingkan dengan target jangka menengah agar terlihat perkembangannya sehingga perlu dilakukan langkah akselerasi. Nilai IKPA di tahun 2022 yang sebesar 93,96 telah mencapai 99% dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 94 (tabel 3.7).

**Tabel 3.4**  
**Rincian Penilaian IKPA Tahun 2022**

Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Revisi DIPA	100	10	10
Deviasi Halaman III DIPA	74,56	10	7,46
Penyerapan Anggaran	96,29	20	19,26
Belanja Kontraktual	86,63	10	8,66
Penyelesaian Tagihan	93,05	10	9,31
Pengelolaan UP dan TUP	98,82	10	9,88
Dispensasi SPM	100	5	5
Capaian Output	97,6	25	24,44
<b>Total</b>			<b>93,96</b>

**Tabel 3.5**  
**Persandingan Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Tahun 2021 dan 2022**

Indikator Kinerja: Indeks Pengelolaan Keuangan					
2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
91	88,10	97	91	93,96	100

**Tabel 3.6**  
**Persandingan Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Tahun 2022 dan Standar Nasional**

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Standar Nasional	% Capaian
Indeks Pengelolaan Keuangan	93,96	93,14	100,88%

**Tabel 3.7**  
**Persandingan Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Tahun 2022 dan 2024**

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
Indeks Pengelolaan Keuangan	93,96	94	99%

Dalam meningkatkan indikator indeks pengelolaan keuangan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Mengadakan *coaching clinic* kepada staf PPK dan unit kerja

Biro Keuangan mengadakan *coaching clinic* kepada staf PPK dan unit kerja dengan tujuan *refresh* kembali pengetahuan *stakeholder* Biro Keuangan terutama staf PPK dan unit kerja terhadap pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan sehari-hari, seperti pertanggungjawaban berkas keuangan, pelaksanaan dan penginputan Tim, pengelolaan pajak, penggunaan aplikasi keuangan serta kedisiplinan terhadap tenggat waktu pelaksanaan anggaran yang harus dijaga dan disesuaikan dengan nilai IKPA tahun anggaran 2022.

2. Sosialisasi Langkah-langkah strategis, IKPA dan Langkah-langkah akhir tahun

Dalam meningkatkan dan mempertahankan nilai IKPA agar tetap tinggi, Biro



Keuangan mengadakan beberapa sosialisasi yang tidak hanya mengundang para staf tapi juga mengundang sampai level Eselon 1, Eselon 2 serta Pejabat perbendaharaan seperti PA, KPA, PPK dan PPSPM yang mempunyai tanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan anggaran di tahun 2022. Sosialisasi yang dilakukan di tahun 2022 antara lain Sosialisasi Langkah-langkah Strategis, Rapor IKPA per Triwulan serta Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun.

### 3. Pembuatan Infografis IKPA

Selain adanya sosialisasi, Biro Keuangan juga mencetak infografis yang disebar saat sosialisasi serta menyebarkannya ke beberapa *channel* informasi seperti Portal Setjen DPR RI dan Instagram. Infografis ini diharapkan dapat memudahkan unit kerja untuk membacanya serta sadar terhadap batasan-batasan yang harus dijaga dalam mempertahankan nilai IKPA di setiap indikator.

### 4. Peningkatan Kompetensi Pegawai

Salah satu aspek penunjang yang dibutuhkan untuk meningkatkan nilai IKPA di setiap tahunnya adalah dengan meningkatkan kompetensi pegawai Biro Keuangan dengan mengadakan sertifikasi Bendahara Pengeluaran. Di tahun 2022, Biro Keuangan mengadakan sertifikasi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan kepada 11 pegawai dengan tujuan meningkatkan tingkat akurasi terhadap pemeriksaan dan pertanggungjawaban berkas keuangan.

### 5. Pengiriman IKPA mini dan *to do list* mingguan

Untuk melakukan monitoring dan kesadaran unit kerja terhadap nilai-nilai indikator IKPA yang harus dijaga, Biro Keuangan mengirimkan IKPA mini setiap bulan ke unit kerja di bawah eselon 2 agar bisa menjaga dan mengawasi setiap indikator yang dianggap lemah serta mempertahankan nilai yang sudah baik. Selain itu Biro Keuangan juga mengirimkan *to do list* mingguan kepada staf PPK agar bisa menyelesaikan tagihan yang sudah mendekati tenggat waktu dan harus diselesaikan oleh unit kerja dengan tujuan optimalisasi laporan keuangan dan peningkatan penilaian kinerja.

## 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan keuangan

Akuntabilitas Kinerja Keuangan mempunyai bobot sebesar 10, pada tahun 2022, target yang ditentukan untuk komponen adalah sebesar 7,62. Apabila penilaian oleh KemenPANRB tidak diperoleh hingga penyusunan Laporan Kinerja, maka realisasi dan

pencapaiannya diperoleh dari hasil penilaian tahun sebelumnya (tabel 3.1). Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/19/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan tahun 2021 mencapai 7,54. Indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0,02 dibanding tahun 2020 yaitu 7,52. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan sebesar 98,95%.

Pada tabel 3.8 dapat dilihat perbandingan realisasi Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan target jangka menengah tahun 2024 yang diamanatkan dalam Renstra Setjen. Tingkat kemajuan capaian pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sudah mencapai 96,42%.

**Tabel 3.8**  
**Persandingan Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**  
**Tahun 2021 dan 2024**

Indikator Kinerja	Capaian 2022*	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,54	7,82	96%

\*Data capaian 2022 merupakan data capaian tahun 2021

Nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan diperoleh dari komponen penilaian opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan. Berikut disampaikan rincian penilaian beberapa tahun terakhir (tabel 3.9)

**Tabel 3.9**  
**Komponen Pembentuk Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Uraian	Skala	2020	2021
a. Opini BPK	Opini	WTP	WTP
b. Nilai Akuntabilitas Kinerja	0-100	64,60	64,90

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi RB Setjen DPR RI 2021

Berdasarkan penilaian tersebut opini BPK telah mencapai nilai maksimal yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setjen DPR RI bahkan telah mendapatkan opini sejak tahun 2009 secara berturut-turut. Selanjutnya pada komponen nilai SAKIP

Setjen DPR RI telah memperoleh nilai 64,90, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,30 dari tahun sebelumnya yaitu 64,60.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP antara lain:

1. Menetapkan regulasi melalui penerbitan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2023.
2. Rencana pembangunan e-SAKIP yang akan digunakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
3. Pemenuhan rekomendasi KemenPANRB terkait SAKIP Setjen DPR RI, diantaranya:
  - a. Mendorong sampai unit terkecil untuk menyusun Rencana Aksi, dimana hal ini telah dilakukan dengan Setjen DPR RI sebagai *pilot project* penggunaan E-Kinerja BKN untuk pemantauan kinerja individu.
  - b. Melakukan reviu terhadap indikator kinerja dan target kinerja pada unit kerja dengan melakukan beberapa perubahan IKU dan IKK di beberapa unit kerja agar lebih menggambarkan kinerjanya. Perubahan ini akan diakomodir pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
  - c. Menggunakan capaian tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan target kinerja tahun yang akan datang agar terdapat perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

#### 4. Nilai Kinerja Organisasi

Perhitungan indikator Nilai Kinerja Organisasi, merupakan salah satu komponen penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Komponen Nilai Kinerja Organisasi mempunyai bobot sebesar 10, pada tahun 2022, target yang ditentukan untuk komponen adalah sebesar 7,50. Apabila penilaian oleh KemenPANRB tidak diperoleh hingga penyusunan Laporan Kinerja, maka realisasi dan pencapaiannya diperoleh dari hasil penilaian tahun sebelumnya (tabel 3.1). Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/19/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Nilai Komponen Kinerja Organisasi tahun 2021 mempunyai nilai 7,41. Indikator ini mengalami kenaikan sebesar 2,78 dibanding tahun 2020 yaitu 4,63. Dikarenakan masih menggunakan perolehan tahun sebelumnya, capaian kinerja pada indikator nilai kinerja organisasi pada tahun 2022 sebesar 98,8%.

Pada tabel 3.10 dapat dilihat perbandingan realisasi Nilai Kinerja Organisasi

dengan target jangka menengah tahun 2024 yang diamanatkan dalam Renstra Setjen. Tingkat kemajuan capaian pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sudah mencapai 150%. Hal ini dikarenakan belum dilaksanakan perubahan Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, oleh karenanya target yang digunakan masih sebesar 4,93. Sedangkan, pada tahun 2022 telah dilaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan dengan memperhatikan hasil penilaian Reformasi Birokrasi pada Indikator Nilai Kinerja Organisasi, dengan target yang ditetapkan sebesar 7,50.

**Tabel 3.10**  
**Persandingan Kinerja Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2021 dan 2024**

Indikator Kinerja	Capaian 2022*	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
Nilai Kinerja Organisasi	7,41	4,93	150%

\*Data capaian 2022 merupakan data capaian tahun 2021

Untuk mendukung peningkatan nilai kinerja organisasi, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Penataan Organisasi

Penataan organisasi dilaksanakan untuk menyelaraskan dengan dinamika organisasi, salah satunya adalah penataan Pusat Penelitian yang harus dilaksanakan sebagai dampak pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada tahun 2022, telah disampaikan usulan penataan organisasi Setjen DPR RI yang berdampak pada perubahan Peraturan Presiden dan Peraturan Sekretaris Jenderal yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI.

b. Evaluasi Kelembagaan

Pada tahun 2022, dilaksanakan kegiatan evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan PermenPAN&RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

c. Analisis Jabatan

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan analisis jabatan yang berdampak pada penambahan 8 jabatan baru, penghapusan 15 jabatan dan perubahan informasi 2 jabatan.

d. Analisis Beban Kerja

Pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja dilaksanakan untuk menindaklanjuti perubahan struktur organisasi, perubahan dinamika kerja pada unit kerja, dan adanya kebijakan terkait penghitungan kebutuhan jabatan fungsional.

e. Evaluasi Jabatan

Kegiatan evaluasi jabatan didasari oleh perhitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional. Pelaksanaan evaluasi jabatan yang dilakukan sudah melalui validasi dari Kemenpan RB.

f. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan penyusunan kamus dan standar kompetensi jabatan Setjen DPR RI dan penyusunan standar kompetensi Jabatan Fungsional yang dibina oleh Setjen DPR RI. Keseluruhan proses penyusunan kamus dan standar kompetensi dilaksanakan berdasarkan PermenPANRB Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN.

g. Pembentukan Jabatan Fungsional

Pada tahun 2022, kegiatan pembentukan jabatan fungsional difokuskan pada penyusunan peraturan pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

h. Monitoring Peta Proses Bisnis

Kegiatan monitoring peta proses bisnis pada tahun 2022 difokuskan pada identifikasi perubahan atau penyesuaian proses bisnis yang diakibatkan oleh penataan organisasi.

i. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan SOP pada tahun 2022 difokuskan kepada 2 (dua) hal yaitu:

1) Monitoring dan Evaluasi SOP

Pelaksanaan Monev SOP difokuskan pada menindaklanjuti catatan dari Tim Penilaian Internal (Insp ektorat Utama) terkait Proses Bisnis yang belum memiliki SOP.

2) Penyusunan dan Penyesuaian SOP

Dalam penyusunan SOP di tahun 2022, dilaksanakan penyusunan SOP baru dan revisi SOP disesuaikan dengan perubahan aturan yang ada, baik terkait struktur organisasi maupun aturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Berdasarkan hasil pembahasan di tahun 2022,

terdapat 184 SOP yang berhasil disusun yang terdiri dari 150 SOP Baru dan 34 SOP AP revisi.

j. Standar Pelayanan

Penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada tahun 2022, telah berhasil mengidentifikasi dan menyusun 8 Standar Pelayanan baru. Selain itu, kegiatan Monev Standar Pelayanan pada tahun 2022 juga sudah dilakukan penyesuaian dalam prosesnya dengan melakukan pelibatan antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan melalui Forum Konsultasi Publik. Dari kegiatan tersebut juga sudah disusun Berita Acara yang berisikan janji dari Penyelenggara Layanan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas – standar pelayanan terkait dan tertuang dalam Laporan Forum Konsultasi Publik.



## Sasaran 2

Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi

01

Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Administrasi



### Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Administrasi

Pelaksanaan survei mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kegiatan survei ini dilaksanakan pada bulan November – Desember 2022.

Survei melibatkan 231 Anggota DPR RI yang terdiri atas 9 (Sembilan) fraksi (Tabel 3.11). Jumlah tersebut masih dalam batas *margin error* sebesar 5% dan *confidence level* 95% sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner *self-report*. Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan, diberikan kepada responden untuk

mendapatkan jawaban (*self-report*). Melalui *self-report* partisipan diminta untuk memberikan respons yang sesuai dengan pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.

**Tabel 3.11**

Jumlah Data Responden per Fraksi

No	Fraksi	Jumlah Anggota	Sampel
1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	128	51
2	Fraksi Partai Golkar	85	34
3	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	78	31
4	Fraksi Partai Nasdem	59	24
5	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	58	23
6	Fraksi Partai Demokrat	54	22
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	50	20
8	Fraksi Partai Amanat Nasional	44	18
9	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	19	8
	<b>Jumlah</b>	<b>575</b>	<b>231</b>

Secara umum terdapat 6 (enam) unsur pelayanan yang terbagi kedalam 24 (dua puluh empat) pertanyaan. Terdapat satu unsur pertanyaan baru dan dua pertanyaan baru. Unsur pertanyaan baru yaitu Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan. Unsur tersebut untuk melihat kecepatan dalam merespon penanganan pengaduan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI. Unsur tersebut mengandung satu pertanyaan baru. Selanjutnya, pertanyaan baru berikutnya yaitu terkait dengan kemudahan memperoleh informasi tentang mekanisme dan prosedur layanan Setjen DPR RI. Pertanyaan tersebut masuk ke dalam unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.

Berdasarkan hasil survei tahun 2022, tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi sebesar 3,33 atau masuk kategori “Baik”. Nilai tersebut sama dengan target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (tabel 3.1), namun mengalami peningkatan dibandingkan hasil tahun sebelumnya (tabel 3.12). Secara umum, jumlah responden yang Sangat Puas dan Puas atas Layanan Deputi Bidang Administrasi sebesar 99,01% dan Tidak Puas sebesar 0,99%. Tidak ada Anggota DPR RI yang sangat

tidak puas atas layanan Deputy Bidang Administrasi.

Seluruh unsur pertanyaan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar dihasilkan dari unsur Sarana dan Prasarana. Sedangkan kenaikan terendah dihasilkan dari unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Adapun tingkat kepuasan yang secara spesifik mendapatkan kenaikan tertinggi yaitu terkait dengan kecepatan dalam memberikan layanan pemeliharaan/perbaikan ruang kerja Anggota DPR RI dengan kenaikan 0,2 poin. Selanjutnya diikuti oleh kecepatan dalam memberikan layanan pemeliharaan/perbaikan Rumah Jabatan Anggota DPR RI sebesar 0,18 poin dan kelengkapan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Anggota sebesar 0,15 poin.

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kecepatan Deputy Bidang Administrasi dalam memberikan pelayanan sebesar 3,35, atau masuk kategori “Baik”. Nilai tersebut meningkat 0,15 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3,20.

Selanjutnya, unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan digunakan untuk menilai kualitas dan ketepatan Deputy Bidang Administrasi dalam memberikan layanan. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas dan ketepatan Deputy Bidang Administrasi dalam memberikan pelayanan sebesar 3,32, atau masuk kategori “Baik”. Nilai tersebut naik 0,04 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3,28.

Kemudian, unsur Kompetensi dan Perilaku SDM digunakan untuk menilai kompetensi dan perilaku SDM yang ada dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kompetensi dan perilaku SDM sebesar 3,31, atau masuk kategori “Baik”. Nilai tersebut naik 0,03 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3,26.

Berikutnya, unsur Sarana dan Prasarana digunakan untuk menilai kelengkapan sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung tugas dan fungsi Anggota DPR RI. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kelengkapan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Deputy Bidang Administrasi sebesar 3,29, atau masuk kategori “Baik”. Nilai tersebut naik 0,20 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3,09.

Terakhir, unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur digunakan untuk menilai apakah Anggota DPR RI dapat dengan mudah memperoleh layanan yang diberikan. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur sebesar 3,35, atau masuk kategori “Baik”. Nilai tersebut naik 0,02 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3,33.

**Tabel 3.12**

Persandingan Hasil Survei Tahun 2021 dan 2022

Pertanyaan		Indeks	
		2021	2022
<b>A.</b>	<b>Waktu Penyelesaian</b>	<b>3,20</b>	<b>3,35</b>
	Kecepatan dalam memberikan:		
1.	Layanan Administrasi Keuangan	3,29	3,34
2.	Layanan Administrasi Perjalanan Dinas	3,31	3,33
3.	Layanan Kesehatan	3,36	3,40
4.	Layanan Pengamanan Dalam Gedung DPR RI	3,36	3,36
5.	Layanan Pemeliharaan/Perbaikan Ruang Kerja Anggota DPR RI	3,02	3,22
6.	Layanan Pemeliharaan/Perbaikan Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD	3,24	3,31
7.	Layanan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Jabatan Anggota DPR RI	3,01	3,19
8.	Layanan Pemeliharaan/Perbaikan Wisma DPR RI	3,05	3,16
<b>B.</b>	<b>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</b>	<b>3,28</b>	<b>3,32</b>
	Kualitas dan ketepatan dalam memberikan:		
9.	Layanan Administrasi Keuangan	3,26	3,35
10.	Layanan Administrasi Perjalanan Dinas	3,31	3,33
11.	Layanan Kesehatan	3,33	3,37
12.	Layanan Wisma	3,13	3,23
13.	Layanan Pengamanan Dalam Gedung DPR RI	3,35	3,33
<b>C.</b>	<b>Kompetensi dan Perilaku SDM</b>	<b>3,26</b>	<b>3,31</b>
14.	Profesionalisme SDM Setjen DPR RI dalam memberikan layanan kepada Anggota DPR RI	3,28	3,33
15.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama SDM Setjen DPR RI dalam memberikan layanan kepada Anggota DPR RI	3,23	3,27
16.	Tanggung jawab SDM Setjen DPR RI (disiplin, mengikuti peraturan, dan kesediaan bekerja di luar jam kerja)	3,21	3,29
17.	Keramahan dan kesopanan SDM Setjen DPR RI dalam memberikan layanan kepada Anggota DPR RI	3,30	3,36
<b>D.</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>3,09</b>	<b>3,29</b>

Pertanyaan		Indeks	
		2021	2022
18.	Kelengkapan sarana dan prasaraa Rumah Jabatan Anggota (RJA)	3,04	3,19
19.	Kelengkapan sarana dan prasarana Wisma DPR RI	3,05	3,16
20.	Kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan layanan kesehatan	3,20	3,29
<b>E.</b>	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>	<b>3,33</b>	<b>3,35</b>
21.	Layanan Setjen DPR RI dalam memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja	3,33	3,38
22.	Kemudahan memperoleh informasi tentang mekanisme dan prosedur layanan Setjen DPR RI		3,33
23.	Kemudahan mendapatkan layanan yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI	3,33	3,34
<b>G.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</b>		<b>3,20</b>
24.	Kecepatan Setjen DPR RI dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan dari Anggota DPR RI		3,20
<b>TOTAL</b>		<b>3,23</b>	<b>3,33</b>

Apabila dibandingkan dengan indeks komposit tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI, maka tingkat kepuasan Deputi Bidang Administrasi berada menempati peringkat tertinggi (tabel 3.13). Selanjutnya diikuti oleh Deputi Bidang Persidangan, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan terakhir Badan Keahlian. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan tahun 2021 dimana tingkat kepuasan Deputi Bidang Administrasi menempati urutan terendah bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi, bahkan di bawah nilai indeks komposit rata-rata.

**Tabel 3.13**

Rekapitulasi Hasil Survei per Eselon I

No	Unit Kerja	2021	2022
1	Deputi Bidang Administrasi	3,23	3,33
2	Deputi Bidang Persidangan	3,27	3,31
3	Badan Keahlian	3,25	3,29
4	Pusat Data dan Informasi	3,23	3,31
<b>Indeks Komposit Setjen DPR RI</b>		<b>3,24</b>	<b>3,31</b>

Untuk target jangka menengah, Deputi Bidang Administrasi menargetkan indeks kepuasan sebesar 3,28, dan target tersebut telah dipenuhi di tahun 2022 ini (tabel 3.14). Untuk penyusunan target tahun 2023 dan 2024, dapat menggunakan hasil tahun 2022 yang lalu sebagai acuan karena target ke depan tidak boleh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel 3.14**

Persandingan Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Tahun 2022 dan 2024

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
Indeks Kepuasan Anggota DPR RI	3,33	3,28	100

Adapun langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan kepuasan Anggota DPR RI, antara lain:

- a. Meningkatkan kecepatan waktu respon (*response time*) atas pengaduan/keluhan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja dan Rumah Jabatan Anggota.
- c. Membangun/memperluas sarana/kanal penyampaian pengaduan/keluhan baik itu melalui aplikasi, email, maupun media WhatsApp.
- d. Menerapkan layanan satu pintu untuk pengajuan perjalanan dinas yaitu menggunakan email Biro Keuangan yang dapat diakses oleh Bagian Perjalanan dan Bagian Administrasi Keuangan.
- e. Menciptakan aplikasi pengajuan perjalanan dinas dan dana kegiatan Anggota DPR RI, agar proses pengajuan lebih terstruktur dan terintegrasi antara Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Perjalanan, serta dapat dimonitoring secara langsung baik oleh Anggota DPR RI, TA/SAA, Verifikator, User Pembayaran, maupun Bendahara.
- f. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM
- g. Memperluas cakupan pelayanan kesehatan.
- h. Menambah alat-alat kesehatan untuk meningkatkan pelayanan bagi Anggota DPR RI dan pengguna lainnya.
- i. Meningkatkan kualitas sarana pengamanan.



# Sasaran 3

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi

01

Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi



02

Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi



## 1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi

Penilaian atas Indeks Reformasi Birokrasi untuk lingkup Deputi Bidang Administrasi dilakukan oleh internal instansi dalam hal ini oleh Inspektorat Utama karena nilai evaluasi yang dilakukan oleh eksternal yakni Kementerian PANRB merupakan nilai instansi yang tidak menyebutkan secara spesifik nilai per eselon, maka untuk itu nilai reformasi birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi menggunakan penilaian berdasarkan evaluasi Tim Penilai Internal (TPI). Evaluasi Internal atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Administrasi ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di Deputi Bidang Administrasi serta memberikan saran perbaikan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi peningkatan pencapaian reformasi birokrasi di tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh TPI menunjukkan bahwa Deputi Bidang Administrasi memperoleh nilai 47,42 (empat puluh tujuh koma empat puluh dua) atau bila dikonversi berdasarkan penilaian pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 memperoleh nilai 94,84% (sembilan puluh empat koma delapan puluh empat persen) dengan kategori AA (Istimewa) berdasarkan tabel reklasifikasi nilai kategori pelaksanaan reformasi birokrasi.

**Tabel 3.15**

Reklasifikasi Kategori Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1.	AA	>45 - 50	Istimewa
2.	A	>40 - 45	Sangat Baik
3.	BB	>35 - 40	Baik
4.	B	>30 - 35	Cukup Baik
5.	CC	>25 - 30	Cukup
6.	C	>15 - 25	Buruk
7.	D	0 – 15	Sangat Buruk

Bila dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2021, terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari “BB” menjadi “AA”. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022, Deputi Bidang Administrasi terus berupaya melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi baik dari Kementerian PANRB maupun dari TPI. Selain itu, penilaian yang dilakukan oleh TPI adalah penilaian atas komponen **Pengungkit** yang terdiri dari aspek Pemenuhan dan *Reform*. Sementara penilaian aspek **Hasil Antara** area

perubahan dan komponen **Hasil** merupakan penilaian untuk reformasi birokrasi di tingkat instansi.

**Tabel 3.16**  
**Persandingan Kinerja Nilai RB Tahun 2021 dan 2022**

Indikator Kinerja: Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi					
2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
BB	BB	100	A (80,01)	AA (94,84)	118,53

Capaian kinerja pada indikator indeks RB di lingkup Deputi Bidang Administrasi telah melebihi standar nasional. Dari hasil penilaian sebesar 94,84 menunjukkan bahwa Deputi Bidang Administrasi telah memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.

**Tabel 3.17**  
**Persandingan Kinerja Nilai RB Tahun 2022 dan Standar Nasional**

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Standar Nasional	% Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi	94,84	75,65	123,37

Capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi telah 100% memenuhi target tahun 2024. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Deputi Bidang Administrasi sudah mulai berjalan dengan baik meski masih perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut.

**Tabel 3.18**  
**Persandingan Kinerja Nilai Tahun 2022 dan 2024**

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi	AA	AA	100%

Upaya perbaikan guna meningkatkan nilai evaluasi Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Administrasi digambarkan pada gambar 3.4.

## ASPEK PEMENUHAN

### Penataan dan Penguatan Organisasi

*Evaluasi Kelembagaan*, melakukan analisa kemungkinan duplikasi fungsi dan tumpang tindih fungsi

### Penataan Sistem Manajemen SDM

#### *Penetapan Kinerja Individu*

- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pengukuran kinerja individu dan kebijakan terkait monitoring dan evaluasi secara berkala (bulanan), serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu secara berkala (bulanan).
- 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pemberian reward & punishment dengan penilaian kinerja individu sebagai dasarnya, serta menyusun laporan periodik terkait pemberian reward & punishment.

### Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

*Budaya Pelayanan Prima*, mengajukan inovasi-inovasi yang telah diciptakan untuk memperoleh akreditasi baik nasional maupun internasional dari lembaga berwenang melalui penyampaian dokumen pengajuan akreditasi atas inovasi.

*Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan*, melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

*Pemanfaatan Teknologi Informasi*, melakukan optimalisasi pelayanan yang menggunakan teknologi informasi sehingga dapat diimplementasikan pada seluruh proses pemberian layanan.

## ASPEK REFORM

### Penataan Tata Laksana

*Transformasi Digital*, melakukan kegiatan validasi dan evaluasi atas upaya transformasi digital, serta menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkelanjutan melalui penyusunan rencana tindak lanjut pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja, pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja, dan pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja.

### Penataan Sistem Manajemen SDM

*Pelanggaran Disiplin Pegawai*, menyusun jumlah pelanggaran disiplin

### Penguatan Akuntabilitas

*Efektivitas dan Efisiensi Anggaran*, melakukan optimalisasi atas program kegiatan sehingga seluruh sasaran kinerja yang diperjanjikan dapat mencapai 100% atau lebih

### Penguatan Pengawasan

*Penanganan Pengaduan Masyarakat*, melakukan optimalisasi atas penanganan pengaduan masyarakat sehingga meningkatkan jumlah pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti

**Gambar 3.4**  
**Upaya Perbaikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

## 2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi

Penilaian atas nilai Evaluasi SAKIP dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal seperti KemenPANRB. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Nomor: 439/PI.03.02/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 hal Hasil Evaluasi Internal atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Administrasi Tahun 2022, Deputi Bidang Administrasi memperoleh nilai 69,65 atau predikat B (Baik). Hasil tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Administrasi Tahun 2022 (tabel 3.1).

**Tabel 3.19**

### Persandingan Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2021 dan 2022

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	
		2021	2022
1.	Perencanaan Kinerja	15,00	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	12,50	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	7,50	15,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0,00	25,00
<b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja</b>		<b>35,00</b>	<b>100</b>

Terdapat perubahan komponen penilaian yaitu semula 3 komponen menjadi 4 komponen (tabel 3.19) sesuai dengan regulasi terbaru. Apabila sebelumnya menggunakan PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berubah menjadi PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 3.20**

### Persandingan Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2021 dan 2022

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot		Nilai	
		2021	2022	2021	2022
a.	Perencanaan Kinerja	15,00	30,00	9,99 (66,59%)	22,80 (76,00%)
b.	Pengukuran Kinerja	12,50	30,00	9,53 (76,25%)	21,00 (70,00%)
c.	Pelaporan Kinerja	7,50	15,00	5,08 (67,86%)	9,6 (64,00%)



No	Komponen Yang Dinilai	Bobot		Nilai	
		2021	2022	2021	2022
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0,00	25,00	0,00 (0,00%)	16,25 (65,00%)
	<b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja</b>	<b>35,00</b>	<b>100</b>	<b>24,60 (70,27%)</b>	<b>69,65 (69,65%)</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>BB</b>	<b>B</b>

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, terdapat penurunan sebesar 0,62, semula 70,27% menjadi 69,65% tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan komponen penilaian dan bobot penilaian (tabel 3.19). Capaian di 2022 tersebut di bawah standar nasional nilai evaluasi SAKIP yang mencapai 71,30 (table 3.21).

**Tabel 3.21**  
**Persandingan Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Tahun 2022 dan Standar Nasional**

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Standar Nasional	% Capaian
Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi	69,65	71,30	97,68%

Untuk mencapai target jangka menengah, dibutuhkan usaha yang luar biasa. Saat ini baru penilaian baru mencapai 87% dari target predikat Memuaskan (A) dengan nilai minimal 80, masih terdapat selisih sebesar 10,35 poin (tabel 3.22) untuk bisa mencapai target di Tahun 2024.

**Tabel 3.22**  
**Persandingan Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2022 dan 2024**

Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi	B	A	87%

Akan dilakukan upaya perbaikan guna meningkatkan nilai evaluasi SAKIP. Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh TPI/Inspektorat Utama untuk dilakukan perbaikan ke depan, yaitu:

- 1) Melakukan revisi target antara PK dengan Renstra



Target yang tercantum di Renstra disusun pada tahun 2020 – 2021 dengan kondisi capaian tahun-tahun sebelumnya dan metode penghitungan yang ada saat itu. Sedangkan target yang disusun di PK saat ini sudah disesuaikan dengan hasil penilaian terakhir dan metode penghitungan kinerja yang mungkin saja sudah berubah. Sesuai dengan rekomendasi KemenPANRB agar target kinerja di tahun berikutnya harus lebih tinggi dibanding capaian tahun sebelumnya agar tidak *undervalue*.

- 2) Melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi secara berkala minimal 6 bulan sekali
- 3) Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar revisi atas penyesuaian strategi dan kebijakan dalam dokumen perencanaan serta dasar atas penyesuaian rencana aksi kegiatan dan anggaran
- 4) Melaksanakan reuiu untuk tingkat Deputi Bidang Administrasi dan Eselon II di bawahnya
- 5) Menjadikan hasil, capaian, hambatan dan rekomendasi dalam Laporan Kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian aktifitas, anggaran dan rencana aksi untuk mencapai kinerja dalam PK berikutnya
- 6) Melaksanakan evaluasi atas AKIP secara berjenjang pada seluruh unit kerja minimal sampai dengan Eselon II
- 7) Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas AKIP internal

## **3.2 Realisasi Anggaran**

### **3.2.1. Realisasi Anggaran Setjen DPR RI**

Realisasi anggaran Satuan Kerja (Satker) Setjen di tahun 2022 mencapai Rp1.493.253.122.542 atau sebesar 99,55% dari total pagu sebesar Rp1.499.942.037.000. Realisasi anggaran tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp1.571.098.972.066 atau 99,01% dari total pagu sebesar Rp1.586.855.876.000. Realisasi anggaran tertinggi di tahun 2022 untuk unit kerja setingkat Eselon I diperoleh Inspektorat Utama sebesar 99,82%. Sedangkan unit kerja setingkat Eselon I yang realisasinya paling rendah adalah Deputi Bidang Persidangan dengan realisasi sebesar 98,63% (tabel 3.23). Adapun realisasi anggaran tertinggi untuk unit kerja setingkat Eselon II diperoleh oleh Inspektorat II dengan realisasi sebesar 100%.

Sedangkan unit kerja yang realisasinya paling rendah adalah Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan realisasi sebesar 95,99%.

Meningkatnya realisasi anggaran disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, realisasi anggaran di unit kerja yang memiliki porsi anggaran cukup besar seperti Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, Biro Umum, Pusat Teknologi Informasi, dan Biro Pemberitaan memberikan hasil yang menggembirakan. Kendala yang ada dan kerap terjadi adalah masih lambatnya proses pertanggungjawaban di unit kerja sehingga realisasi anggaran baru bergerak cepat di triwulan IV 2022.

Pimpinan Setjen DPR RI secara berkala memonitoring dan mengevaluasi kinerja realisasi anggaran. Apabila ditemukan kendala suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, maka segera dilakukan relokasi anggaran ke unit kerja lainnya yang masih membutuhkan tambahan anggaran.

**Tabel 3.23**

**Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2022**

Biro / Pusat / Inspektorat / Bagian	Pagu	Realisasi	
	Rp	Rp	%
<b>01. Deputi Bidang Persidangan</b>	200.805.791.000	198.057.353.782	98,63%
01. Biro Persidangan I	11.069.833.000	11.026.462.570	99,61%
02. Biro Persidangan II	2.929.994.000	2.890.230.360	98,64%
03. Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	4.648.131.000	4.629.039.365	99,59%
04. Biro Kesekretariatan Pimpinan	11.502.735.000	11.041.418.596	95,99%
05. Biro Pemberitaan Parlemen	129.593.239.000	128.323.888.919	99,02%
06. Biro Protokol dan Humas	41.061.859.000	40.146.313.972	97,77%
<b>02. Deputi Bidang Administrasi</b>	1.158.578.591.000	1.155.399.218.888	99,73%
07. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	3.627.938.000	3.623.243.016	99,87%
08. Biro Sumberdaya Manusia Aparatur	13.758.754.000	13.682.618.943	99,45%
09. Biro Umum	281.631.913.000	280.323.844.619	99,54%
10. Biro Organisasi dan Perencanaan	10.591.138.000	10.582.177.435	99,92%
11. Biro Keuangan	243.997.383.000	242.650.800.147	99,45%
12. Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	604.971.465.000	604.536.534.728	99,93%
<b>03. Inspektorat Utama</b>	7.534.370.000	7.520.929.143	99,82%
13. Inspektorat I	2.743.108.000	2.729.670.575	99,51%
14. Inspektorat II	4.791.262.000	4.791.258.568	100,00%
<b>04. Pusat Pendidikan dan Pelatihan</b>	10.514.155.000	10.390.933.161	98,83%
15. Pusat Pendidikan dan Pelatihan	10.514.155.000	10.390.933.161	98,83%
<b>05. Pusat Teknologi Informasi</b>	72.748.422.000	72.317.724.904	99,41%
16. Pusat Teknologi Informasi	72.748.422.000	72.317.724.904	99,41%
<b>06. Badan Keahlian</b>	49.760.708.000	49.566.962.664	99,61%
17. Pusat Perancangan Undang-Undang	20.647.363.000	20.494.756.802	99,26%
18. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	5.323.600.000	5.322.088.010	99,97%
19. Pusat Kajian Anggaran	5.691.230.000	5.690.385.194	99,99%
20. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	6.738.000.000	6.734.801.029	99,95%
21. Pusat Penelitian	11.360.515.000	11.324.931.629	99,69%
<b>Grand Total</b>	<b>1.499.942.037.000</b>	<b>1.493.253.122.542</b>	<b>99,55%</b>

### 3.2.2. Realisasi Anggaran per unit kerja di Deputi Bidang Administrasi

Realisasi anggaran Deputi Bidang Administrasi di tahun 2022 mencapai Rp1.155.399.218.888 atau 99,73% dari total pagu sebesar Rp1.158.578.591.000. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding realisasi anggaran tahun 2021 yang mencapai Rp1.172.721.281.618, atau 99,28% dari total pagu sebesar Rp1.181.237.459.000. Realisasi anggaran Deputi Bidang Administrasi selaras dengan realisasi Satker Setjen karena anggaran Deputi Bidang Administrasi sangat mendominasi anggaran di Satker Setjen dengan porsi 77,24%. Realisasi anggaran Deputi Bidang Administrasi di atas rata-rata realisasi Setjen DPR RI. Kunci keberhasilan Deputi Bidang Administrasi ada tiga hal. Pertama, monitoring dan evaluasi secara berkala. Realisasi anggaran di lingkup unit kerja Deputi Bidang Administrasi dimonitor setiap bulan. Bahkan, di triwulan IV, monitoring dilakukan per pekan. Apabila ada yang kurang optimal dan masih di bawah target IKPA, akan dikonfirmasi kendalanya seperti apa dan apa yang dapat diperbaiki.

Kedua, optimalisasi anggaran. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi basis data unit kerja mana yang membutuhkan tambahan anggaran dan memiliki kelebihan anggaran. Sebagai contoh, anggaran belanja pegawai yg berada di bawah kewenangan Biro Keuangan ada potensi tidak terealisasi optimal karena muncul kebijakan bahwa tunjangan kinerja di bulan Desember 2022 akan dibayarkan di bulan Januari 2023. Tahun sebelumnya, tunjangan kinerja bulan Desember dibayarkan juga di bulan Desember tahun yang sama dengan *cut off* penghitungan di pertengahan bulan Desember. Untuk mengoptimalkan sisa anggaran yang ada, dilakukan relokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan di Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.

Ketiga, penyusunan rencana kegiatan dan penggunaan anggaran secara lebih mendalam. Hal tersebut sangat penting untuk memonitor pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran. Apabila target yang ditetapkan telah tercapai dan masih terdapat sisa anggaran, maka akan segera dilakukan relokasi ke kegiatan lainnya.

Realisasi anggaran tertinggi untuk unit kerja di bawah koordinasi Deputi Bidang Administrasi dihasilkan oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma sebesar 99,93% sebagaimana yang tercantum di tabel 3.23. Realisasi tertinggi

kedua di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dihasilkan oleh Biro Organisasi dan Perencanaan dengan capaian sebesar 99,92%. Berikutnya ditempati oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebesar 99,87%, Biro Umum sebesar 99,54%, dan terakhir Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Biro Keuangan memiliki capaian yang sama yaitu sebesar 99,45%. Berdasarkan data tersebut maka terdapat tiga unit kerja yang realisasi anggarannya di atas kinerja Setjen DPR RI yaitu Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, Biro Organisasi dan Perencanaan, dan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

Di tahun 2022 terdapat tiga unit kerja yang realisasi anggarannya di atas rata-rata Deputy Bidang Administrasi yaitu Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, Biro Organisasi dan Perencanaan, dan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. Realisasi anggaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma sebagian besar untuk kegiatan pemeliharaan Gedung dan instalasi, RJA, Wisma, pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana (*custom*), renovasi ruang kerja Setjen, renovasi ruang kerja Pimpinan DPR RI, dan pengadaan lahan untuk akses Wisma/Pusdiklat DPR RI. Sisa anggaran bersumber dari sisa-sisa kontrak kegiatan yang selesai di akhir tahun.

Realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan sebagian besar untuk kegiatan penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI. Sisa anggaran bersumber dari honorarium narasumber dan jamuan rapat.

Realisasi anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagian besar untuk kegiatan pembentukan dan evaluasi produk hukum, pengelolaan pertimbangan dan dokumentasi informasi hukum, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Sisa anggaran bersumber dari honorarium tim dan perjalanan dinas.

Realisasi anggaran Biro Umum sebagian besar untuk pembayaran honorarium tenaga kontrak (pamdal, pengemudi, pramubakti), pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, layanan kesehatan, dan pengadaan peralatan keamanan. Sisa anggaran bersumber dari sisa-sisa kontrak pekerjaan yang baru selesai di akhir tahun.

Realisasi anggaran Biro Sumber Daya Manusia Aparatur sebagian besar untuk kegiatan penyusunan pola karir, layanan kinerja dan informasi ASN, layanan non ASN, dan pembinaan jabatan fungsional. Sisa anggaran bersumber dari kegiatan perjalanan dinas dan honorarium tim.

Realisasi anggaran Biro Keuangan sebagian besar untuk kegiatan pelayanan administrasi keuangan dan perjalanan dinas, administrasi Barang Milik Negara, dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Sisa anggaran bersumber dari sisa anggaran belanja pegawai.

### 3.2.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel 3.23., alokasi anggaran Deputy Bidang Administrasi sepanjang tahun 2022 dialokasikan sekitar 53% untuk mencapai sasaran “Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Administrasi”. Adapun alokasi anggaran untuk memenuhi sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas” dan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Administrasi yang berkualitas” masing-masing sebesar 45% dan 2%. *Stakeholders* utama dari Deputy Bidang Administrasi adalah Anggota DPR RI sehingga sebagian besar pengalokasian anggaran untuk memenuhi kepuasan Anggota DPR RI sudah tepat. Tugas utama Deputy Bidang Administrasi adalah memberikan dukungan administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana bagi Anggota DPR RI, ASN, dan PPNASN. Hasil (*outcome*) dari pemberian dukungan administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana tersebut adalah Anggota DPR RI, selaku *stakeholders* utama Deputy Bidang Administrasi, merasa puas atas dukungan dan layanan yang diberikan. Kegiatan besar yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan Anggota DPR RI antara lain perbaikan ruang kerja Anggota DPR RI, layanan RJA dan Wisma, perluasan dan penambahan fasilitas layanan kesehatan, dan pengadaan peralatan keamanan untuk meningkatkan keamanan Anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Deputy Bidang Administrasi berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dan capaian dapat dikatakan efisien apabila suatu organisasi atau unit kerja mampu

mencapai kinerja yang optimal dengan anggaran yang minimal. Deputi Bidang Administrasi mampu mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kurang dari 100% (Tabel 3.24). Deputi Bidang Administrasi senantiasa meningkatkan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang diberikan secara berkesinambungan (*continuous improvement*) berapapun alokasi anggaran yang tersedia. Deputi Bidang Administrasi menyadari bahwa kinerja yang diberikan menjadi cerminan wajah dari Setjen DPR RI.

**Tabel 3.24**  
**Realisasi Anggaran Per Sasaran Program**

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran (dalam Rp000)		
		Target	Real	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Esensi	Esensi	100%	525.375.325	522.800.108	99,51%
		91	93,96	103%			
		7,62	7,54	99%			
		7,50	7,41	99%			
2.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi	3,33	3,33	100%	616.572.543	616.079.989	99,92%
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi	A			18.560.068	18.443.970	99,37%
		B	B	100%			
<b>TOTAL</b>					<b>1.160.507.936</b>	<b>1.157.324.068</b>	<b>99,73%</b>





## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

### 4.2 LANGKAH PERBAIKAN

#### 4.1. KESIMPULAN

Di tahun 2022, Deputi Bidang Administrasi memiliki tujuh indikator kinerja utama di dalam Perjanjian Kinerja. Sebanyak lima dari tujuh indikator tersebut masih sesuai atau lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan yaitu Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Indeks Pengelolaan Keuangan, Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi, dan nilai RB dan SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Administrasi. Adapun untuk dua indikator yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Nilai Kinerja Organisasi masih menggunakan hasil penilaian tahun 2021 sehingga kurang objektif untuk disandingkan.

Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan target yaitu mencapai tahapan “Esensi”. Hasil tersebut meningkat dibanding tahun 2021 yang mencapai “Inisiasi”. Untuk mencapai target jangka menengah yaitu “Proaktif”, dibutuhkan satu tahapan lagi.

Indeks Pengelolaan Keuangan menunjukkan hasil yang sangat mengembirakan dengan perolehan nilai 93,96, di atas target yang telah ditetapkan dan capaian tahun sebelumnya. Salah satu pertimbangan untuk menetapkan target tahun 2022 sama dengan tahun 2021 adalah karena capaian tahun 2021 di bawah target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai target jangka menengah sebesar 94, maka hanya dibutuhkan sedikit perbaikan dan konsistensi dalam mempertahankan kinerja saat ini.

Indeks Kepuasan Anggota DPR RI tahun 2022 sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 3,30. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding capaian tahun lalu sebesar 3,23, bahkan lebih tinggi dibanding target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 3,28. Ke depan, masih diperlukan perbaikan pelayanan terutama di sektor yang masih memiliki nilai standar yaitu layanan rumah jabatan Anggota dan layanan Wisma.

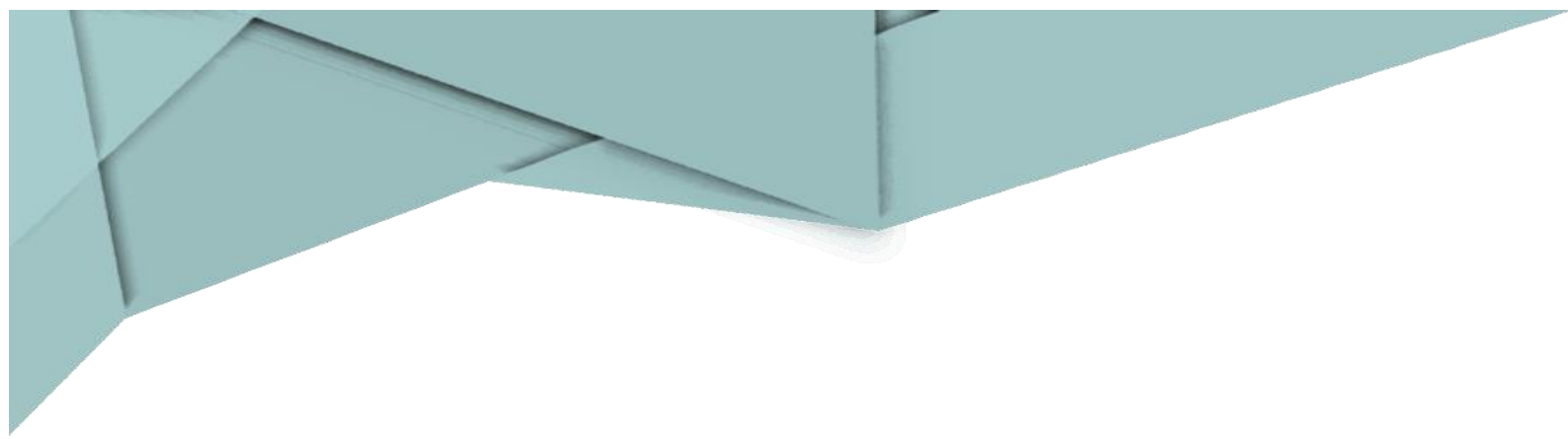
Nilai indeks Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Inspektorat Utama lebih tinggi dibanding target yang telah ditetapkan yaitu mendapat nilai AA (94,84), bahkan di atas rata-rata nasional yang mencapai 75,65. Capaian di tahun 2022 ini sudah sesuai dengan target jangka menengah yaitu mendapat predikat AA.

Adapun untuk nilai evaluasi SAKIP, masih sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu B (60 – 70). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, terdapat penurunan sebesar 0,62, semula 70,27% menjadi 69,65%. Penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan komponen penilaian dan bobot penilaian. Capaian di 2022 tersebut di bawah standar nasional nilai evaluasi SAKIP yang mencapai 71,30. Untuk mencapai target jangka menengah, dibutuhkan usaha yang luar biasa. Saat ini baru mencapai 87% dari target predikat Memuaskan (A) dengan nilai minimal 80, Masih terdapat selisih sebesar 10,35 poin.

Dalam pengelolaan anggaran, realisasi anggaran Deputi Bidang Administrasi tahun 2022 mencapai 99,73%, lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang sebesar 99,28%. Pencapaian tersebut juga lebih tinggi dibanding realisasi anggaran rata-rata kesetjeraan tahun 2022 yang mencapai 99,55%. Realisasi anggaran unit kerja tertinggi di lingkup Deputi Bidang Administrasi dihasilkan oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma sebesar 99,93%. Kunci keberhasilan tersebut didukung oleh tiga hal yaitu monitoring dan evaluasi secara berkala, optimalisasi anggaran, dan penyusunan rencana kegiatan dan penggunaan anggaran secara mendalam.

## 4.2. LANGKAH PERBAIKAN

1. Pengembangan aplikasi legalitas yang memuat layanan evaluasi produk hukum Setjen DPR RI.
2. Koordinasi dengan Pustekinfo, Komisi/Badan, serta unit kerja lain yang menangani pengaduan masyarakat perlu ditingkatkan, terutama dalam upaya pengembangan aplikasi Sidumas.
3. Mempercepat dan mengoptimalkan pengembangan sistem JDIH Setjen DPR RI ([jdih.dpr.go.id](http://jdih.dpr.go.id)) yang saat ini telah terintegrasi dengan JDIH Nasional dengan menampilkan inovasi berupa fitur atau menu baru serta kelengkapan meta data yang dapat memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan layanan informasi dan dokumentasi hukum yang lebih cepat, efisien, dan efektif.
4. Melanjutkan dan mengembangkan Zona Integritas (ZI) di Biro Keuangan dengan melakukan perbaikan serta inovasi di seluruh area ZI antara lain dengan *tagline* “Digit-all Keuangan”.
5. Penguatan regulasi dan tata kelola.
6. Pengembangan aplikasi untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, efektif, dan efisien.
7. Pembangunan e-SAKIP.
8. Pengembangan aplikasi e-MIKIR ASIK dan Si-REVI yang dapat meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran.
9. Penyesuaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja.
10. Menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Utama terkait dengan AKIP dan RB
11. Mempercepat waktu tanggap (*response time*) atas keluhan yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI.
12. Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana.
13. Menyediakan dan mempermudah saluran/kanal pengaduan.
14. Membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan seluruh *stakeholders*.
15. Penyusunan Standar Pelayanan Internal agar sesuai standar melalui penerapan ISO.
16. Peningkatan kualitas SDM secara berkesinambungan, baik itu melalui pemberian ijin belajar, tugas belajar, maupun kegiatan diklat.





## LAMPIRAN





SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Sumariyandono, MPM.  
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

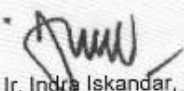
Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si  
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, Agustus 2022  
Pihak Pertama,

  
Ir. Sumariyandono MPM.  
NIP. 19650618 198811 1 001

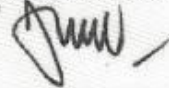


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Esensi
		2. Indeks Pengelolaan Keuangan	91
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,62
		4. Nilai Kinerja Organisasi	7,50
2.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,33
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi	A
		2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi	B

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.165.267.490.000,-

Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si  
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, Agustus 2022  
Deputi Bidang Administrasi,



Ir. Sumariyandono, MPM  
NIP. 19650618 198811 1 001

